

Etika Deontologis dan Kebajikan: Fondasi Meningkatkan Akuntabilitas Birokrasi (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bima)

Nurfarhati Nurfarhati
Universitas Mbojo Bima

Korespondensi penulis: nurfarhartybima11@gmail.com

Mukhlis Ishaka
Universitas Mbojo Bima

Haeril Haeril
Universitas Mbojo Bima

Abstract. *This study aims to explore and analyze how the integration of deontological ethics and virtue ethics can serve as a foundation for enhancing accountability and transparency in the Social Services Department of Bima Regency, focusing on the understanding and application of ethical principles by civil servants and their impact on governance. Employing a qualitative descriptive method, this research involved in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies to collect data from various informants directly involved in the implementation and supervision of bureaucratic ethics. Data analysis was conducted through an iterative model, including data reduction, data display, and conclusion drawing to gain a deep understanding of the dynamics of deontological and virtue ethics in the bureaucratic environment of Bima Regency. The findings indicate that although the integration of deontological and virtue ethics holds great potential in enhancing transparency and accountability, real challenges are faced, including the misalignment between ethical principles and bureaucratic operational realities, resistance to change, and weaknesses in the oversight system. These findings highlight the importance of comprehensive ethical education and training, the development of effective accountability mechanisms, and increased community participation as key strategies to overcome these challenges and strengthen the ethical foundation in the governance of Bima Regency.*

Keywords: *deontological ethics, virtue ethics, accountability, bureaucracy, Bima Regency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana integrasi etika deontologis dan etika kebajikan dapat menjadi fondasi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Dinas Sosial Kabupaten Bima, dengan fokus pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika oleh aparatur sipil serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data dari berbagai informan yang terlibat langsung dalam implementasi dan pengawasan etika birokrasi. Analisis data dilakukan melalui model iteratif, mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dinamika etika deontologis dan kebajikan di lingkungan birokrasi Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun integrasi etika deontologis dan kebajikan memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tantangan nyata dihadapi, termasuk ketidakselarasan antara prinsip etika dan realitas operasional birokrasi, resistensi terhadap perubahan, dan kelemahan dalam sistem pengawasan. Temuan ini menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan etis yang komprehensif, pengembangan mekanisme akuntabilitas yang efektif, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai strategi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat fondasi etik dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Bima.

Kata kunci: etika deontologis, Kebajikan, akuntabilitas, Birokrasi, Kabupaten Bima

PENDAHULUAN

Etika dalam birokrasi merupakan pilar utama yang menentukan integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Annas, 2015). Fondasi ini bukan hanya sebatas pada aturan atau kode etik formal yang harus dipatuhi oleh aparatur sipil, melainkan lebih pada sebuah prinsip dasar yang mengakar pada nilai, norma, dan moral (Maile et al., 2023). Etika di lingkungan birokrasi mendorong setiap birokrat untuk bekerja berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan integritas, yang semuanya vital dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Morrell & Dahlmann, 2023). Transparansi memungkinkan proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah menjadi lebih terbuka bagi pengawasan publik, keadilan memastikan pelayanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, sedangkan integritas menuntut kejujuran dan tanggung jawab penuh atas tindakan yang diambil (Jeong & Han, 2013). Ketiga elemen ini, ketika diterapkan secara konsisten, berperan penting dalam membangun birokrasi yang bertanggung jawab dan bersih dari praktik korupsi (Hirji, 2019).

Penginternalisasian nilai-nilai etika dalam setiap aspek pemerintahan memerlukan komitmen yang kuat dari semua tingkatan birokrasi (Dt, 2003). Ini berarti bahwa pendekatan terhadap etika haruslah bersifat holistik, melibatkan tidak hanya pemahaman teoretis tentang apa itu etika, tapi juga penerapannya dalam praktek sehari-hari (McDonald, 2018). Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan tentang etika birokrasi harus menjadi agenda rutin, guna memastikan bahwa setiap birokrat memahami pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etik dalam pekerjaannya (Syakiran Akmal Ismail et al., 2018). Lebih dari itu, penegakan kode etik harus ditegakkan dengan tegas dan konsisten, dimana sanksi bagi pelanggaran diimbangi dengan penghargaan bagi mereka yang menunjukkan dedikasi tinggi terhadap prinsip etik (Akbar et al., 2021). Langkah ini esensial untuk memperkuat budaya etika dalam birokrasi dan mendorong sebuah lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel (Chakrabarty & Erin Bass, 2015).

Dalam era digital saat ini, tantangan terhadap etika birokrasi semakin kompleks, mengingat adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat dimudahkan oleh kemajuan teknologi (Bisri & Asmoro, 2019). Namun, teknologi juga menawarkan peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui peningkatan akses informasi dan partisipasi publik (Yunaida, 2018). Fondasi etika yang kuat menjadi lebih penting dari sebelumnya dalam menghadapi dinamika baru ini (Hariatih dan Sukardi, 2022). Etika tidak hanya sebagai panduan bagi birokrat dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga sebagai prinsip yang menginspirasi inovasi dalam pelayanan publik yang lebih baik (Nurkholis et al., 2020).

Etika deontologis dan etika kebajikan merupakan dua pendekatan filosofis yang mendasari praktik moral dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam struktur birokrasi (McDonald, 2018). Kedua etika ini, ketika diaplikasikan dalam konteks birokrasi, memainkan peran penting dalam mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya bermartabat tapi juga bertanggung jawab terhadap rakyatnya (Ainley, 2017). Etika deontologis, dengan fokusnya pada ketaatan terhadap kumpulan aturan dan kewajiban moral, menawarkan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengatur perilaku birokrat (Rizki Afri Mulia, 2022). Prinsip dasar dalam etika deontologis adalah bahwa ada tindakan yang secara moral wajib dilakukan atau dihindari, tidak peduli konsekuensinya (Annas, 2015). Dalam konteks birokrasi, hal ini mendorong aparatur sipil untuk mengikuti kode etik dan regulasi yang ada tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai kewajiban moral yang harus dipenuhi demi kebaikan bersama (Maile et al., 2023). Ini menjamin bahwa setiap tindakan dan keputusan diambil berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran, yang merupakan nilai-nilai esensial dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Morrell & Dahlmann, 2023).

Di sisi lain, etika kebajikan menekankan pentingnya karakter dan kebajikan personal dalam menentukan tindakan yang benar (Jeong & Han, 2013). Pendekatan ini menganggap bahwa tindakan moral bukan hanya tentang mengikuti aturan, tapi juga tentang menjadi orang yang memiliki kebajikan, seperti keadilan, keberanian, kemurahan hati, dan kebijaksanaan (Hirji, 2019). Dalam birokrasi, etika kebajikan mendorong pembentukan karakter aparatur sipil yang tidak hanya pandai dalam membuat keputusan yang etis, tapi juga memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan publik (McDonald, 2018). Penerapan etika kebajikan dalam birokrasi mengarah pada pembangunan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional, di mana birokrat tidak hanya diperlengkapi dengan keahlian teknis, tetapi juga dibina untuk mengembangkan sikap dan karakter yang mendorong pelayanan publik yang berkualitas (Syakiran Akmal Ismail et al., 2018).

Penggabungan etika deontologis dan etika kebajikan dalam praktik birokrasi menciptakan fondasi yang kuat untuk mewujudkan birokrasi yang bermartabat dan bertanggung jawab (Chakrabarty & Erin Bass, 2015). Etika deontologis memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, sementara etika kebajikan memberikan inspirasi dan motivasi untuk melakukan tindakan yang benar karena alasan yang benar (Rizki Afri Mulia, 2022). Kombinasi ini memastikan bahwa birokrasi tidak hanya beroperasi dalam kerangka hukum dan regulasi yang ketat, tapi juga dipandu oleh nilai-nilai moral dan kebajikan yang mendalam (Ainley, 2017). Hal ini sangat relevan dalam konteks

masyarakat modern, di mana tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik semakin meningkat (Rizki Afri Mulia, 2022).

Dengan mengedepankan etika deontologis dan kebajikan, birokrasi dapat mengatasi berbagai tantangan moral dan praktis yang dihadapinya, seperti korupsi, nepotisme, dan inefisiensi (Morrell & Dahlmann, 2023). Aparatur sipil yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ini akan lebih mampu melayani publik dengan integritas dan dedikasi yang tinggi, membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Grönun, 2015). Lebih jauh lagi, pendekatan ini mendukung penciptaan lingkungan kerja yang etis dan produktif, di mana setiap anggota birokrasi didorong untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera (Baumane-Vitolina et al., 2016).

Demikian, pentingnya integrasi etika deontologis dan etika kebajikan dalam praktik akuntabilitas birokrasi di Kabupaten Bima, seperti di banyak daerah lain, menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang erat kaitannya dengan kelemahan sumber daya manusia (SDM) serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi etik dalam tata kelola pemerintahan (Wateh, 2022). Tantangan utama yang sering muncul berkisar pada kurangnya pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip etika deontologis dan etika kebajikan di kalangan aparatur sipil, serta bagaimana menerapkannya dalam situasi nyata (Wijaya et al., 2019). Hal ini sering kali diperparah oleh sistem pendidikan dan pelatihan untuk aparatur yang belum sepenuhnya memadai, sehingga menyebabkan ketidakmampuan dalam menerjemahkan teori etik ke dalam praktik kerja sehari-hari yang etis dan bertanggung jawab (Purnomo Agung S, 2020).

Selain itu, kelemahan SDM di Kabupaten Bima juga terlihat dari adanya budaya kerja yang masih memprioritaskan kepatuhan terhadap aturan dan perintah atas inisiatif pribadi untuk bertindak etis (Bisri & Asmoro, 2019). Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang cenderung pasif, di mana birokrat lebih banyak bertindak berdasarkan instruksi daripada dorongan moral internal untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat (Yunaida, 2018). Kondisi ini diperburuk oleh minimnya akuntabilitas dan transparansi, membuat sulitnya mengukur efektivitas dan efisiensi tindakan yang diambil oleh aparatur sipil (Hariatih dan Sukardi, 2022). Kesenjangan antara teori etik dan praktik di lapangan menjadi salah satu penghambat utama dalam menciptakan birokrasi yang benar-benar bertanggung jawab dan etis (Budiman et al., 2022).

Meskipun demikian, terdapat peluang yang signifikan untuk mengintegrasikan etika deontologis dan etika kebajikan dalam praktik akuntabilitas birokrasi di Kabupaten Bima. Salah satu peluang tersebut adalah melalui pengembangan dan penguatan program pendidikan

dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan etika aparatur sipil. Program ini dapat diorientasikan untuk tidak hanya menyampaikan pengetahuan teoritis mengenai etika deontologis dan kebajikan, tetapi juga memberikan latihan praktis mengenai penerapannya dalam situasi kerja sehari-hari. Dengan demikian, birokrat diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai etik dan menerapkannya secara konsisten dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka.

Selanjutnya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja birokrasi dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah Kabupaten Bima dapat memperoleh masukan yang berharga untuk perbaikan proses dan hasil kerja birokrasi. Hal ini, pada gilirannya, akan memacu aparatur sipil untuk bertindak lebih etis dan bertanggung jawab, mengingat mereka akan merasa lebih diawasi oleh publik. Integrasi etika deontologis dan etika kebajikan dalam akuntabilitas birokrasi menawarkan jalan menuju pemerintahan yang lebih efektif dan bermartabat di Kabupaten Bima. Meskipun terdapat tantangan dan kelemahan, peluang untuk memperbaiki situasi tetap terbuka lebar. Dengan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparatur sipil, dan masyarakat, integrasi dua pendekatan etik ini dapat membawa transformasi positif dalam tata kelola pemerintahan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bertolak dari masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana integrasi etika deontologis dan etika kebajikan dapat menjadi fondasi dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi di Dinas Sosial Kabupaten Bima. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik etis yang sudah diterapkan dalam birokrasi setempat serta mengungkap kelemahan dan tantangan yang dihadapi. Lebih lanjut, penelitian ini berusaha memetakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan kedua pendekatan etik tersebut secara lebih efektif dalam sistem birokrasi, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Tujuan utama adalah untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai etik deontologis dan kebajikan dapat diinternalisasi oleh aparatur sipil, sehingga membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintah yang akhirnya meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi dari penelitian ini muncul dari situasi birokrasi saat ini yang sering kali dihadapkan pada masalah korupsi, nepotisme, dan kurangnya transparansi, yang semuanya menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kebaruan dari penelitian ini terletak

pada pendekatannya yang mengintegrasikan dua teori etik yang sering kali dipelajari secara terpisah, dalam konteks praktik akuntabilitas birokrasi lokal. Indikator yang digunakan untuk menganalisis data meliputi tingkat pemahaman dan penerapan prinsip etika deontologis dan kebajikan oleh aparatur sipil, pengaruhnya terhadap keputusan dan tindakan birokrasi, serta dampak integrasi etika ini terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan insight baru mengenai cara-cara inovatif dalam memperkuat fondasi etik birokrasi yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktikal dan relevan dengan kondisi sosial-budaya Kabupaten Bima.

METODE

Metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih sebagai pendekatan utama untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana etika deontologis dan kebajikan dapat diintegrasikan dalam praktik akuntabilitas birokrasi. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan memilih individu-individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi serta pengawasan etika birokrasi di Dinas Sosial Kabupaten Bima, termasuk aparatur sipil, akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat sipil. Tahapan pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan berlapis mengenai praktik, persepsi, dan tantangan dalam menerapkan etika deontologis dan kebajikan dalam birokrasi. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan menggunakan model iteraktif, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini bersifat siklikal, di mana peneliti secara berulang kembali ke data lapangan untuk memastikan bahwa interpretasi dan konklusi yang dihasilkan akurat dan mencerminkan realitas empiris yang ada. Dalam konteks penelitian ini, model analisis iteraktif memungkinkan peneliti untuk secara berkelanjutan mengevaluasi dan memperdalam pemahaman tentang dinamika etika deontologis dan kebajikan di Dinas Sosial Kabupaten Bima, seraya memperkaya analisis dengan perspektif baru yang muncul seiring berjalannya waktu. Pendekatan ini tidak hanya menjamin ketelitian analitis dalam mengidentifikasi pola dan tema, tetapi juga memfasilitasi pengembangan rekomendasi yang pragmatis dan berbasis bukti untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, indikator analisis yang digunakan dirancang untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan penerapan prinsip etika deontologis dan etika kebajikan telah diinternalisasi oleh aparatur sipil di Dinas Sosial Kabupaten Bima, serta pengaruhnya terhadap keputusan dan tindakan dalam lingkup birokrasi. Indikator ini mencakup evaluasi terhadap kemampuan aparatur sipil dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip etika ke dalam kebijakan dan praktik sehari-hari, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan dan implementasi tindakan yang menyangkut pelayanan publik. Selanjutnya, indikator ini juga mengkaji dampak dari integrasi etika deontologis dan etika kebajikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan (Grönum, 2015). Hal ini mencakup penilaian terhadap seberapa efektif integrasi kedua pendekatan etik tersebut dalam menciptakan sistem birokrasi yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh masyarakat (Annas, 2015). Dengan demikian, indikator-indikator ini berperan penting dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam memperkuat fondasi etik di lingkungan birokrasi, sekaligus menawarkan insight tentang strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan integritas dan efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Bima.

Internalisasi Prinsip-prinsip Etika Deontologis dan Kebajikan

Internalisasi prinsip-prinsip etika deontologis dan kebajikan menandai sebuah perjalanan menuju pemahaman mendalam akan etika dan moral yang berfokus pada tindakan yang benar serta pembentukan karakter yang baik (McDonald, 2018). Etika deontologis, yang digagas oleh filsuf seperti Immanuel Kant, menekankan pentingnya tindakan yang dilakukan bukan karena konsekuensinya, melainkan karena tindakan tersebut adalah benar menurut hukum moral universal. Prinsip ini mengajarkan individu untuk bertindak berdasarkan kewajiban dan aturan moral tanpa mempertimbangkan hasil dari tindakan tersebut (Morrell & Dahlmann, 2023). Di sisi lain, etika kebajikan, yang berakar pada pemikiran Aristoteles, menitikberatkan pada pentingnya membentuk karakter yang baik dan mempraktikkan kebajikan sebagai cara hidup. Kebajikan seperti keberanian, kemurahan hati, dan keadilan dianggap esensial dalam mencapai kebahagiaan sejati dan kesejahteraan manusia. Internalisasi kedua prinsip etika ini mendorong individu untuk tidak hanya mempertimbangkan kebenaran atau kesalahan suatu tindakan, tetapi juga untuk mengembangkan diri menjadi individu yang memiliki karakter moral yang kuat. Melalui proses refleksi diri, pendidikan moral, dan pengalaman, seseorang belajar untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kehidupan sehari-hari, membimbingnya dalam mengambil keputusan yang etis dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain serta lingkungan. Internalisasi ini tidak hanya

berdampak pada perkembangan pribadi tetapi juga membentuk masyarakat yang adil dan empatik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi prinsip-prinsip etika deontologis dan kebajikan dalam pengambilan keputusan di Dinas Sosial Kabupaten Bima menghadapi tantangan nyata dalam lingkungan birokrasi yang kompleks dan dinamis. Prinsip etika deontologis, yang menekankan pentingnya tindakan berdasarkan kewajiban moral dan aturan tanpa mempertimbangkan hasil, menjadi fundamental dalam menjunjung tinggi standar pelayanan publik yang tidak memihak dan adil. Sementara itu, etika kebajikan menuntut pembentukan karakter pegawai yang berorientasi pada kebaikan, seperti kemurahan hati, keadilan, dan empati, yang esensial dalam memberikan layanan sosial yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakselarasan antara prinsip etika ini dengan realitas birokrasi yang sering kali lebih mengutamakan efisiensi dan prosedur ketat di atas pertimbangan etis individu. Hal ini dapat mengakibatkan situasi dimana pegawai merasa terjepit antara mengikuti aturan yang ada dan melakukan apa yang mereka anggap benar secara moral. Selain itu, tekanan dari politik lokal dan ekspektasi masyarakat dapat menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan, sering kali memaksa pegawai untuk mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan.

Untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan internalisasi prinsip-prinsip etika secara efektif, Dinas Sosial Kabupaten Bima dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, adalah penting untuk mengintegrasikan pelatihan etika secara rutin dalam program pengembangan profesional pegawai. Pelatihan ini harus mencakup studi kasus nyata dan simulasi dilema etis yang sering dihadapi, membekali pegawai dengan alat untuk membuat keputusan yang etis dalam situasi yang sulit.

Kedua, mengembangkan mekanisme feedback dan dialog yang terbuka antara pegawai dan manajemen, serta antara dinas dan masyarakat yang dilayani, dapat meningkatkan transparansi dan memungkinkan penyesuaian kebijakan dan praktik berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Ini juga membantu membangun kepercayaan dan mengurangi potensi konflik kepentingan.

Ketiga, penerapan sistem penghargaan dan akuntabilitas yang jelas dapat memotivasi pegawai untuk bertindak sesuai dengan prinsip etika, mengakui dan merayakan contoh tindakan etis dalam pelayanan publik, sekaligus menegur pelanggaran etik secara adil dan transparan.

Keempat, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dapat menyediakan sumber daya tambahan dan perspektif baru dalam mengatasi masalah sosial, sekaligus memperkuat praktik etis melalui kemitraan dan pembelajaran bersama.

Dengan menerapkan strategi ini, Dinas Sosial Kabupaten Bima dapat mengatasi tantangan struktural yang dihadapi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip etika deontologis dan kebajikan menjadi pusat dari semua pengambilan keputusan, memperkuat kapasitas mereka untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.

Integrasi Etika dalam menciptakan transparansi dan Akuntabilitas Birokrasi

Integrasi etika deontologis dan kebajikan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi dan pelayanan publik menggambarkan pendekatan holistik yang memadukan kewajiban moral dan pembentukan karakter etis untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dan terbuka. Etika deontologis, dengan prinsip utamanya yang menekankan pentingnya mematuhi kewajiban dan aturan sebagai tindakan moral yang benar tanpa mempertimbangkan konsekuensi, menawarkan fondasi yang kuat untuk transparansi. Ini mendorong pegawai dan pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan, tidak hanya karena takut akan hukuman, tetapi karena pengakuan akan kewajiban moral mereka untuk melakukannya (Chakrabarty & Erin Bass, 2015). Sebaliknya, etika kebajikan, yang fokus pada pengembangan kualitas moral atau kebajikan individu seperti keadilan, keberanian, dan kemurahan hati, menekankan pentingnya motivasi internal dan integritas pribadi dalam menyediakan layanan publik yang etis dan berkualitas. Melalui lensa etika kebajikan, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya dilihat sebagai kewajiban profesional tetapi sebagai ekspresi dari karakter moral yang baik, di mana individu secara proaktif berupaya untuk bertindak dengan cara yang memperkuat kepercayaan publik dan memajukan kebaikan bersama (Baumane-Vitolina et al., 2016).

Dalam praktiknya, integrasi kedua pendekatan etis ini memungkinkan pembentukan birokrasi dan sistem pelayanan publik yang tidak hanya memenuhi standar legal dan profesional tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan kode etik yang jelas, yang mencakup prinsip-prinsip etika deontologis dan kebajikan, serta melalui pendidikan dan pelatihan etis bagi pegawai dan pejabat publik. Pendidikan etis berkelanjutan membantu membangun kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam situasi nyata, sementara sistem penilaian dan insentif yang dirancang untuk mengakui dan menghargai tindakan yang mencerminkan nilai-nilai etis tersebut dapat mendorong perilaku yang sesuai. Selain itu,

penerapan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, seperti audit reguler, sistem pelaporan whistleblower, dan forum dialog publik, dapat memperkuat transparansi dan memungkinkan masyarakat untuk menilai dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi layanan publik juga merupakan aspek kunci, memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya memenuhi standar etika yang tinggi tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Melalui upaya-upaya ini, integrasi etika deontologis dan kebajikan menjadi lebih dari sekedar idealisme teoretis; ia menjadi praktik nyata yang meningkatkan kualitas dan integritas pemerintahan dan layanan publik, membangun kepercayaan publik, dan memajukan kesejahteraan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi etika deontologis dan etika kebajikan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bima perlu mendefinisikan ulang tata kelola dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menekankan pada prinsip kewajiban moral dan pengembangan karakter yang baik. Etika deontologis, yang berfokus pada pemenuhan kewajiban dan aturan sebagai tindakan moral yang benar tanpa mempertimbangkan konsekuensi, membawa struktur dan ketertiban dalam prosedur birokrasi, menjamin bahwa setiap tindakan dan keputusan diambil berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan tanpa pandang bulu. Sementara itu, etika kebajikan mendorong pegawai untuk menginternalisasi nilai-nilai seperti integritas, empati, dan keberanian, yang esensial dalam melayani kebutuhan masyarakat dengan hati. Kombinasi kedua pendekatan etis ini dapat memperkuat fondasi transparansi dan akuntabilitas dengan memastikan bahwa tindakan dan keputusan tidak hanya mematuhi aturan formal tetapi juga dilandasi oleh motivasi internal untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Melalui pelatihan etis dan pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan kedua prinsip ini, Dinas Sosial Kabupaten Bima memiliki peluang untuk mengembangkan kultur birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, membangun kepercayaan publik, dan meningkatkan efektivitas layanan.

Namun, tantangan dalam mengimplementasikan integrasi ini tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi internal dari pegawai yang mungkin terbiasa dengan praktik-praktik lama yang lebih menekankan pada kepatuhan formal daripada penilaian etis dan moral dalam pengambilan keputusan. Kebiasaan institusional yang kuat dan kurangnya pemahaman atau apresiasi terhadap nilai etika kebajikan dapat menghambat internalisasi nilai-nilai ini dalam praktik sehari-hari. Selain itu, tekanan eksternal, termasuk ekspektasi politis dan masyarakat yang terkadang kontradiktif, dapat menimbulkan dilema etis yang kompleks, mempersulit pegawai untuk menavigasi antara prinsip etis dan realitas praktis. Kelemahan

dalam sistem pengawasan dan mekanisme akuntabilitas yang kurang efektif juga berpotensi mengurangi transparansi dan memperlemah kepercayaan publik, menjadikan integrasi etika deontologis dan kebajikan sebagai tantangan yang signifikan.

Untuk mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada, Dinas Sosial Kabupaten Bima perlu mengambil langkah strategis dan inovatif. Pertama, pengembangan dan implementasi kode etik yang komprehensif, yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip etika deontologis dan kebajikan, harus dijadikan prioritas. Kode etik ini tidak hanya harus menyediakan panduan tentang perilaku etis tetapi juga memfasilitasi pembentukan karakter dan kebajikan etis melalui pelatihan dan refleksi berkelanjutan. Kedua, penerapan sistem akuntabilitas yang kuat, termasuk mekanisme pengawasan yang efektif dan sistem pelaporan yang transparan, dapat meningkatkan kredibilitas dan mengurangi peluang untuk penyalahgunaan wewenang. Pemberdayaan masyarakat melalui forum partisipasi publik dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan juga krusial untuk memastikan bahwa layanan dan kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Akhirnya, pembangunan budaya organisasi yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan etis kontinu akan memperkuat integrasi nilai-nilai ini dalam jangka panjang. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, Dinas Sosial Kabupaten Bima dapat mengatasi kelemahan yang ada dan membangun sistem birokrasi yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, menandai langkah maju signifikan dalam pelayanan publik yang berorientasi pada etika dan kebajikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyelami bagaimana integrasi etika deontologis dan etika kebajikan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bima, menghadapi tantangan yang signifikan namun juga menawarkan peluang besar untuk pembaruan. Ditemukan bahwa penerapan prinsip etika deontologis memungkinkan pembentukan kerangka kerja yang jelas untuk tindakan birokrasi yang adil dan tidak memihak, sementara etika kebajikan mendorong pembentukan karakter individu yang berorientasi pada kepentingan umum dan pelayanan publik yang berkualitas. Namun, ketidakselarasan antara prinsip-prinsip etis dan realitas operasional birokrasi, resistensi terhadap perubahan, dan kelemahan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat utama. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi integrasi etika dalam tata kelola birokrasi sebagai langkah vital untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pelayanan, menyoroti bahwa tantangan yang dihadapi

bukan hanya berupa hambatan struktural tetapi juga melibatkan dimensi kultural dan edukatif dalam birokrasi.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Dinas Sosial Kabupaten Bima mengadopsi strategi multi-faset untuk mengintegrasikan etika deontologis dan kebajikan dalam praktik sehari-hari. Pertama, pengembangan program pendidikan dan pelatihan etis yang komprehensif esensial untuk membangun pemahaman dan apresiasi terhadap etika dalam birokrasi. Program ini harus mencakup simulasi dilema etis dan studi kasus yang relevan untuk memfasilitasi aplikasi teori etik dalam situasi nyata. Kedua, peningkatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi, melalui sistem pelaporan yang lebih terbuka dan forum dialog publik, dapat mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan terhadap tindakan birokrasi. Ketiga, pemberian insentif untuk perilaku etis dan penerapan sanksi yang adil bagi pelanggaran etik dapat memperkuat budaya integritas dalam organisasi. Akhirnya, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan institusi akademis dapat membawa perspektif baru dan mendukung upaya-upaya inovatif dalam meningkatkan praktik etis. Melalui implementasi saran-saran ini, Dinas Sosial Kabupaten Bima dapat mengatasi tantangan yang ada dan mewujudkan birokrasi yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainley, K. (2017). *Virtue Ethics Book Section*.
- Akbar, A. M. A., Mappamiring, & Ma'aruf, A. (2021). KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA A Muh Alwilah Akbar¹ □ , Mappamiring² , Adnan Ma ' Ruf³ 2 . Ilmu Administrasi Negara , Universitas Muhammadiyah Makassar , Indonesia PENDAHULUAN Birokrasi Di Indonesia Memiliki Tantangan Yang Sangat Besar Dimana Merek. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Xof8bbgaaaaj&citation_for_view=Xof8bbgaaaaj:M3ejud6nzc8c
- Annas, J. (2015). Why Virtue Ethics Does Not Have A Problem With Right Action. *Oxford Studies In Normative Ethics, Volume 4*, 13–33. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198722144.003.0002>
- Baumane-Vitolina, I., Cals, I., & Sumilo, E. (2016). Is Ethics Rational? Teleological, Deontological And Virtue Ethics Theories Reconciled In The Context Of Traditional Economic Decision Making. *Procedia Economics And Finance*, 39(November 2015), 108–114. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30249-0](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30249-0)
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik Di Indonesia. *Journal Of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/Jogiv.V1i1.298>
- Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, & Diella Jauza. (2022).

- Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64–74. <https://doi.org/10.54783/Dialektika.V19i1.65>
- Chakrabarty, S., & Erin Bass, A. (2015). Comparing Virtue, Consequentialist, And Deontological Ethics-Based Corporate Social Responsibility: Mitigating Microfinance Risk In Institutional Voids. *Journal Of Business Ethics*, 126(3), 487–512. <https://doi.org/10.1007/S10551-013-1963-0>
- Dt, K. (2003). Etika Pelayanan Publik. *Demokrasi*, 9(1), 61–70.
- Grönun, N. J. (2015). A Return To Virtue Ethics: Virtue Ethics, Cognitive Science And Character Education. *Verbum Et Ecclesia*, 36(1), 1–6. <https://doi.org/10.4102/Ve.V36i1.1413>
- Hariatih Dan Sukardi. (2022). Etika Pelayanan Publik Pada Kantor Imigrasi. *Jurnal Penkomi:Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 5(1), 62–74.
- Hirji, S. (2019). What’s Aristotelian About Neo-Aristotelian Virtue Ethics? *Philosophy And Phenomenological Research*, 98(3), 671–696. <https://doi.org/10.1111/Phpr.12520>
- Jeong, C., & Han, H. (2013). Exploring The Relationship Between Virtue Ethics And Moral Identity. *Ethics And Behavior*, 23(1), 44–56. <https://doi.org/10.1080/10508422.2012.714245>
- Maile, A., Thompson, A., Mcloughlin, S., & Kristjánsson, K. (2023). The Choice Of Deontological, Virtue Ethical, And Consequentialist Moral Reasoning Strategies By Pre- And In-Service Police Officers In The U.K.: An Empirical Study. *Ethics And Behavior*, 33(8), 637–655. <https://doi.org/10.1080/10508422.2022.2124995>
- Mcdonald, G. (2018). Ethical Theory. In *Business Ethics*. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107445666.015>
- Morrell, K., & Dahmann, F. (2023). Aristotle In The Anthropocene: The Comparative Benefits Of Aristotelian Virtue Ethics Over Utilitarianism And Deontology. *Anthropocene Review*, 10(3), 615–635. <https://doi.org/10.1177/20530196221105093>
- Nurkholis, A., Samsugi, S., Fitratullah, M., Permatasari, B., Widodo, T., & Meilisa, L. (2020). Pelatihan Customer Service Untuk Tenaga Kependidikan Smkn 2 Kalianda. *Journal Of Technology And Social For Community Service (JTSCS)*, 2(2), 167–172. <https://ejournal.teknokrat.ac.id/index.php/teknobdimas>
- Purnomo Agung S. (2020). *Refocusing Core Business Imigrasi Dan Pengembangannya Di Era Interdependensi Global* (Issue May). <https://www.researchgate.net/publication/351435896>
- Rizki Afri Mulia, M. (2022). *Etika Administrasi Publik Penerbit Cv. Eureka Media Aksara*. 25.
- Syakiran Akmal Ismail, N., Benlahcene, A., Bin Zainuddin, R., & Syakiran Akmal Bt Ismail, N. (2018). A Narrative Review Of Ethics Theories: Teleological & Deontological Ethics A Narrative Review Of Ethics Theories: Teleological & Deontological Ethics. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 23(7), 31–38. <https://doi.org/10.9790/0837-2307063138>
- Wateh, A. (2022). *Analisis Etika Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*. 16–75.
- Wijaya, A. A., Irawan, B., & Apriani, F. (2019). Samarinda. *Administrasi Negara*, 7(1), 6592–

8604.

Yunaida, E. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Tenaga Kependidikan (Tendik) Terhadap Kepuasan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 7(1), 61–72. <https://doi.org/10.33059/jmk.v7i1.758>